

BAB II

RUNTUHNYA KEKUASAAN DAN KEDATANGAN KEMBALI BELANDA KE INDONESIA

Pada Bab *kedua*, penulis akan memaparkan runtuhnya kekuasaan dan kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Diawali dengan pemaparan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa transisi kekuasaan dari masa kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang. Untuk selanjutnya, penulis paparkan secara detil kondisi masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, diharapkan bisa memahami bagaimana perjuangan pendiri bangsa melawan kolonialisme.

Setelah Jepang menyerah kalah pada 15 Agustus 1945, Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia pada zaman penjajahan) berada di bawah kekuasaan *South East Asia command*. Ialah Inggris yang bertugas melucuti dan menggantikan pendudukan Jepang. Mendengar berita kekalahan dan menyerahnya Jepang dari pihak Sekutu, seketika kelompok pemuda mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah bagi bangsa ini, Hindia Belanda sudah tidak ada lagi yang hidup ialah Indonesia merdeka yang siap mempertahankan kedaulatannya terhadap segala macam imperialisme dan kolonialisme. Namun, dengan berbagai macam upaya Belanda ingin menegakkan kembali pemerintahannya di Indonesia.

A. Masa Transisi dari Penjajahan Belanda ke Pemerintahan Jepang

Perang Asia Timur Raya berawal dengan penyerbuan tentara Jepang di pusat pertahanan Amerika Serikat “Pearl Harbour” pada tanggal 7 Desember 1941. Tentara Jepang dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya semakin agresif beraksi mendarat di wilayah Indocina, Filipina,

Singapura, Indonesia dan China yang ingin dikuasainya²¹. Setelah penyerangan terhadap Pearl Harbour, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt menandatangani pernyataan perang terhadap Jepang, yang diikuti oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh²². Pendaratan pertama tentara Jepang di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942 kemudian merambah ke daerah-daerah di Jawa juga dikuasainya pada tgl 1 Maret 1942. Wilayahnya semakin meluas dengan dikuasainya Batavia tanggal 5 Maret 1942 dan semakin merajalela ke wilayah-wilayah lainnya dengan tujuan melumpuhkan pasukan Belanda. Belanda semakin terdesak dengan penyerangan Jepang dan akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dengan demikian berakhirilah masa kekuasaan Belanda di Indonesia²³. Maka ribuan orang-orang Belanda yang masih tertinggal di Indonesia dikumpulkan oleh Jepang dalam beberapa kamp untuk diinternir.

Pada awal kedatangannya Jepang menyampaikan tujuannya datang ke Indonesia adalah membebaskan penduduk pribumi dari cengkeraman tangan penjajah Belanda, tidak lupa diikuti dengan propaganda secara intensif melalui radio gelombang pendek yang menggugah rasa kebangsaan orang Indonesia²⁴. Oleh karena itu, pada awal mula penyerbuan Jepang reaksi para penduduk pribumi tidak begitu buruk, bahkan menyambut kedatangan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan rangkaian politik imperialismenya di Asia Tenggara. Sebagai akibat dari kemajuan industri Jepang yang pesat ditempuhlah strategi ekspansi untuk mencari bahan

²¹Suryanegara, “*Api Sejarah*”, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), Hlm. 11.

²²Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, “*Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Hlm. 2.

²³Panitia Peringatan 75 tahun Kasman Singodimedjo, “*Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), Hlm. 48.

²⁴Kurasawa, “*Kuasa Jepang di Jawa*”, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), Hlm. xlviii.

mentah dan daerah pemasaran baru juga sumber pangan Jepang. Menguatnya ambisi militerisme Jepang disamping didorong konstalasi politik di Jepang sendiri yang memungkinkan hal itu terjadi. Invasi Jepang ke Indonesia merupakan bagian dari kerangka politik ekspansionisme Jepang di Asia Tenggara²⁵. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu: *Pertama*, menghapuskan pengaruh Barat dikalangan rakyat Indonesia. *Kedua*, memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya²⁶. Dalam usaha untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang membutuhkan banyak sekali kebutuhan perang termasuk didalamnya barang-barang logistik yang pada saat itu kebutuhan logistik yang dimiliki Jepang untuk perang masih sangat kurang.

Tentara Jepang memang betul-betul memahami Indonesia dengan segala situasi dan kondisinya yang pada saat itu semangat perjuangan sedang bergelora. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan berbagai cara yaitu, mengizinkan mengibarkan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia dan mengizinkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentu saja hal ini membuat hati rakyat Indonesia bahagia, karena mereka menganggap bahwa kedatangan bangsa Jepang dapat membebaskan belenggu dari penjajahan Belanda. Namun secara perlahan anggapan ini pun lenyap karena tidak lama setelah kedatangannya, simpati yang begitu besar berbalik menjadi antipasti yang pada gilirannya akan memuncak menjadi kebencian dan peperangan²⁷. Pendudukan Jepang di Indonesia telah merobek-robek sendi-sendi nilai ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan malapetaka baru dengan merasakan penderitaan dan

²⁵*Ibid.*, Hlm. 1.

²⁶M.C. Ricklefs, “*Sejarah Indonesia Modern*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2007), Hlm. 298-301.

²⁷Zaiul Muatamar, Skripsi: “*Reaksi Umat Islam Terhadap Politik Pendudukan Jepang di Indonesia*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 1989), Hlm. 32-33.

kesengsaraan yang luar biasa karena menguras harta dan tenaga rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan kekurangan sandang dan pangan yang kemudian mengakibatkan kelaparan dan kematian serta penderitaan moral.

Jepang melakukan propaganda yang intensif untuk menyakinkan rakyat Indonesia bahwa bangsa Jepang adalah saudara tua seperjuangan melawan Barat. Namun kenyataannya semua tindakan dan perlakuan menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Pada awal pendudukan, Jepang mengambil dua langkah penting yaitu *pertama*, menstabilkan kondisi ekonomi yang terlihat dari upayanya untuk menguasai inflasi ekonomi dengan menetapkan patokan harga sebagian besar barang dan menangani dengan keras penimbun barang. *Kedua*, Jepang mengeluarkan aturan produk hukum baru sesuai dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia. Selama pendudukan, Jepang mengekang berbagai organisasi di Indonesia. Mengadakan kerjasama dengan kaum nasionalis yang bertujuan bersatu dan berdiri sepenuhnya dibelakang Jepang serta memperlancar pekerjaan pemerintahan militer. Jepang menyuruh kaum Nasionalis untuk turut aktif didalam Pemerintahan Gunsei. Dengan demikian Jepang dapat menggunakan para pemimpin Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya.

Sebaliknya para pemimpin tidak mau begitu saja diperalat Jepang, mereka menggunakan sarana Jepang guna tetap berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Karena pada pada saat itu, masa-masa sulit dalam pergerakan nasional Indonesia. Karena bangsa Indonesia dalam kondisi yang sangat lemah, jalan terbaik yang ditempuh dengan kerjasama dengan Jepang. Dari kerjasama ini hanyalah sebuah alat untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia yang telah lama mereka perjuangkan. Lembaga yang diciptakan Jepang seperti Java Hookokai (kebangkitan rakyat Jawa), Putera, Peta, Fujinkai (perkumpulan kaum wanita), Keibodan (barisan pemuda membantu polisi, kebakaran dan serangan udara pembantu), Seinendan (korp pemuda semi militer), Heiho

(pasukan pembantu) dan sebagainya. Sedangkan kelompok pejuang lain yang menolak bekerjasama dengan Jepang dan anti-fasisme membentuk jaringan bawah tanah dan terus berjuang. Meskipun perjuangan mereka dalam kelompok yang berbeda-beda strateginya bukan berarti perpecahan. Taktik yang mereka lakukan mempunyai tujuan yang sama yaitu memupuk semangat kebangsaan guna memudahkan jalan untuk mencapai kemerdekaan.

Pada Tanggal 7 September 1944 , Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun waktunya belum ditentukan. Setelah Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji itu, tentara pendudukan Kekaisaran Jepang di Indonesia mulai melonggarkan pengawasan mereka terhadap kaum pergerakan Kemerdekaan khususnya kaum Nasionalis, namun tidak bagi kelompok sayap kiri atau komunis. Kemudian Kekaisaran Jepang juga mulai membentuk berbagai macam organisasi yang menjadi wadah bagi para tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan lainnya. Harapan Perdana Menteri Koiso adalah agar Indonesia mau membantu Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II yang mulai menunjukkan kekalahan sebagai bentuk ucapan terimakasih²⁸. Tentara Jepang terus terdesak menuju kekalahan, sehingga agar Jepang memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia membentuk Dokuritzu Zyoombi Tsooskai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945, bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangannya selanjutnya BPUPKI dibubarkan dan diganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Jenderal Terauchi,

²⁸Nino Oktorino, “*Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), Hlm. 46.

dengan tujuan penggantian nama ini terkesan bahwa organisasi PPKI bukan bentukan Jepang tetapi hasil kesepakatan dan perjuangan para tokoh kemerdekaan Indonesia. Meskipun akhirnya janji ini tidak terealisasi karena Amerika Serikat berhasil mempercepat selesainya perang dengan Bom Hiroshima pada tanggal 6 agustus 1945 dan bom atom yang kedua meledak di Nagasaki. Para pemimpin-pemimpin Jepang mengetahui bahwa negaranya mendekati kekalahan dan tak punya kekuasaan lagi untuk memikirkan nasib bangsa lain. Pada tanggal 15 agustus 1945 menyerahlah Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Maka lenyaplah janji kemerdekaan dari Jenderal Terauchi. Dan dengan penandatanganan penyerahan Jepang tanpa syarat itu, lenyap pulalah cita-cita Jepang untuk membentuk Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dibawah pimpinannya.

B. Lahirnya Sebuah Negara Baru Republik Indonesia

Berita tentang kekalahan Jepang telah berkembang begitu cepat di Jakarta, namun Soekarno dan Hatta tidak mengetahuinya. Mengingat pada tanggal 9 Agustus 1945 kedua tokoh tersebut diundang ke Dalat oleh Marsekal Terauchi, Panglima tertinggi angkatan perang Jepang dan seluruh Asia Tenggara²⁹, untuk membicarakan janji kemerdekaan Indonesia oleh Jepang yang akan diberikan pada tanggal 7 September 1945. Dua hari kemudian, saat Sukarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak Sukarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Kemudian timbulah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua yang diwakili oleh Sukarno dan Hatta belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah dan berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Sukarno mengingatkan Sutan Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sementara Sutan Syahrir sebagai golongan muda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang, jika proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang³⁰. Jelas bukan kemerdekaan yang seperti inilah yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia

²⁹Mohammad Hatta, "*Sekitar Proklamasi*", (Jakarta: Tintamas, 1982), Hlm. 18.

³⁰Nugroho Notokusanto, "*Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*", (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1976), Hlm. 79.

menginginkan kemerdekaan yang bebas dari pengaruh negara lain, baik Jepang maupun Belanda.

Mendengar pernyataan Kaisar Jepang telah diumumkan dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 15 Agustus 1945 bahwa Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu. Situasi yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jakarta saat itu menegangkan. Golongan muda menuntut Sukarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari pengaruh Jepang, sedangkan tokoh-tokoh tua dalam BPUPKI-PPKI dengan motor Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi dapat dilakukan sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945³¹. Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Bangsa Indonesia saat itu harus menghadapi sekutu yang akan berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Apalagi saat itu anggota PPKI sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Mereka takut terjadi pertumpahan darah. Sebaliknya, golongan muda berpendapat bahwa pertumpahan darah adalah risiko yang tidak bisa dihindari. Kemungkinan pertumpahan darah dapat terjadi sebab Jepang diminta menjaga status quo di wilayah yang diduduki, sehingga proklamasi bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran (Sagimun MD, 1989: 277).

Dalam posisi yang genting itu, golongan muda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus 1945. Keputusan rapat yang dipimpin Chairul Saleh menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada orang lain dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus

³¹Rini D Yuniarti, "*BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), Hlm. 37.

diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Soekarno dan Hatta agar supaya mereka diikutsertakan menyatakan Proklamasi³². Hasil rapat itu kemudian disampaikan kepada Sukarno dan Hatta di kediamannya masing-masing. Sekali lagi Sukarno dan Hatta dengan tegas menolak permintaan itu, walaupun hal itu sempat menimbulkan ketegangan ketika Wikana (wakil golongan muda yang bertugas menyampaikan hasil rapat kepada Sukarno) menyatakan akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu Sukarno bukannya takut justru balik menggertak dengan mempersilahkan para pemuda untuk membunuhnya saat itu juga. Sukarno juga mengatakan bahwa dia tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu karena terikat dengan kedudukannya sebagai Ketua PPKI, sehingga menurutnya soal proklamasi kemerdekaan harus ditanyakan kepada wakil-wakil PPKI³³.

Gagalnya permintaan golongan muda agar Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan yang terlepas dari Jepang, segera mendorong mereka untuk mengadakan rapat lagi. Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya terlibat dalam rapat di Lembaga Bakteriologi, rapat itu juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi dari Barisan Pelopor dan Shodanco Singgih dari Daidan Peta JakartaSyu. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Sukarno dan Hatta harus disingkirkan ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang³⁴. Rencana itu kemudian dilakukan dengan membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Rencana itu berjalan lancar karena diperolehnya dukungan berupa perlengkapan tentara Peta dari Cudanco Latief Hendraningrat. Sehari penuh

³²Adam Malik, *“Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945”*, (Jakarta: Wijaya,1962), Hlm. 35.

³³Cindy Adams, *“Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”*, (Jakarta: Gunung Agung, 1966), Hlm. 316-317.

³⁴*Ibid.*, Hlm. 81.

Soekarno dan Hatta ada di Rengasdengklok. Rencananya para pemuda bermaksud untuk menekan mereka berdua agar segera memproklamasikan kemerdekaan terlepas dari ikatan dengan Jepang. Akan tetapi, wibawa mereka berdua sebagai tokoh senior pergerakan nasional membuat para pemuda penculiknya segan untuk melakukan penekanan. Menurut keterangan Drs. Singgih bahwa:

"Di Rengasdengklok terjadi perundingan antara pemuda dengan Sukarno. Perundingan itu berlangsung ketika Bung Hatta berada di luar ruangan". Sementara itu menurut keterangan Hatta mengatakan, *"Di Rengasdengklok tidak terjadi apa-apa, bahkan sebagai akibat perbuatan pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok menyebabkan proklamasi terlambat satu hari"*.

Di Jakarta, Ahmad Subardjo dari golongan tua bertemu dengan Wikana dari golongan muda. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera diadakan di Jakarta. Berdasar hal itu, Ahmad Subardjo bersama dengan sekretaris pribadinya Sudiro dengan diantar Jusuf Kunto pergi ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan Hatta. Setelah rombongan Sukarno dan Hatta tiba kembali ke Jakarta, mereka berdua menemui Mayor Jendral Nishimura untuk menjajagi sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan. Dalam pertemuan itu juga hadir Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penterjemah. Dalam pertemuan Sukarno dan Hatta menekankan kepada Nishimura bahwa Jendral Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kepada PPKI. Sementara itu, Nishimura menolak proklamasi kemerdekaan karena Jepang telah terikat untuk menjaga status quo di daerah yang didudukinya. Berdasar hal itu Nishimura melarang Soekarno dan Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan proklamasi kemerdekaan³⁵

³⁵*Ibid.*, Hlm. 53-54.

Oleh karena itu, diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri, terlepas dari Jepang. Dilakukanlah persiapan untuk mengadakan rapat PPKI. Ahmad Subardjo menelpon ke Hotel Des Indes guna menyediakan ruangan untuk mengadakan rapat. Tetapi pihak hotel membalas, bahwa lewat pukul 10 malam tidak diperbolehkan mengadakan rapat lagi. Gagalnya memperoleh hotel Des Indes, membuat Ahmad Subardjo meminta kesediaan Laksamana Maeda seorang Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut yang dianggap cukup aman untuk menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat. Pertimbangan lainnya Laksamana Maeda mempunyai hubungan yang baik dengan Ahmad Subardjo dan para pemuda yang bekerja di kantornya. Di ruang makan rumah itu dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Miyoshi orang kepercayaan Nishimura juga hadir bersama dengan Mbah Diro, B.M. Diah, dan Sukarni untuk menyaksikan Sukarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo membahas perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, tokoh-tokoh lainnya baik golongan tua maupun golongan muda menunggu di serambi muka. Sukarno yang menuliskan konsep Proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan³⁶.

Menjelang subuh Sukarno bertiga menemui mereka yang sudah menunggu di serambi muka. Pada saat itu, Sukarno mengajak mereka semua bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Hatta, tetapi oleh Sukarni diusulkan bahwa yang menandatangani naskah Proklamasi cukup dua orang saja, yakni Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu juga disetujui oleh mereka yang hadir, sehingga Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah Proklamasi berdasar naskah tulisan tangan Sukarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Pada 17

³⁶*ibid.*, Hlm. 10-11.

Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan di depan rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, karena apabila dilakukan di lapangan Ikada dikhawatirkan dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Usul itu disetujui dan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung di Pegangsaan Timur No 56 pada Jum'at, 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 10.00) pada saat bulan puasa³⁷. Keesokan harinya pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Dalam Sidang itu berhasil ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) hasil rancangan Panitia Kecil di dalam Panitia Hukum Dasar, yang diketuai oleh Soepomo sebagai UUD bagi negara Indonesia. UUD ini kemudian dikenal sebagai UUD 1945. PPKI dalam sidangnya itu selain memutuskan mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD bagi Bangsa Indonesia, juga membuat keputusan penting lainnya. Keputusan penting itu adalah pengangkatan Soekarno dan M. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu, atas usul Soekarno dibentuk sebuah Komite Nasional yang mampu dikumpulkan dengan cepat pada masa-masa genting, karena anggota-anggota PPKI banyak yang akan meninggalkan Jakarta. Tugas komite itu adalah sebagai badan pembantu presiden, selama kondisi di Indonesia masih dalam kondisi darurat³⁸.

Dengan demikian inilah babak baru dalam sejarah Indonesia dan inilah sebenarnya masa-masa yang dinanti-nanti oleh mayoritas rakyat Indonesia. Peristiwa Proklamasi ini ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa dari rakyat Indonesia dari hampir setiap wilayah. Banyak reaksi-reaksi yang sangat beragam, mulai terbentuknya laskar-laskar rakyat, pembentukan pemerintah daerah sementara seperti reaksi dari Sam Ratulangi, gerakan pengibaran bendera Merah Putih

³⁷*Ibid.*, Hlm. 85-87.

³⁸Safroedin Bahar dkk., ed, "*Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*", (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), Hlm. 447.

diseluruh wilayah Indonesia hingga pelucutan senjata milik tentara Jepang atau bahkan perebutan fasilitas yang pernah dikuasai Jepang. Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, benar-benar keluar dari keinginan bangsa Indonesia. Jepang sama sekali tidak turut campur, mereka hanya mendapat laporannya saja, karena Jepang kenyataannya masih menjadi penguasa di Indonesia meskipun waktu itu sudah menyerah kepada pasukan Sekutu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah salah satu puncak dari hasil perjuangan rakyat Indonesia termasuk pemudanya yang telah sekian lama diperjuangkan. Proklamasi ini juga membuka suatu lembaran baru bagi sejarah gerakan nasional Indonesia, bagi perjuangan pemuda Indonesia. kemerdekaan Indonesia berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada Bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang³⁹.

³⁹Juniarto, “*Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 4.

C. Kedatangan Kembali Belanda Pasca Revolusi

Setelah dikalahkan oleh Jepang dalam perang Pasifik tahun 1942, Belanda meninggalkan Indonesia dan membentuk pemerintahan sipil di Australia yang dikenal dengan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dibawah H.J. Van Mook. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, dengan demikian Jepang harus melepaskan daerah-daerah yang didudukinya dalam perang Pasifik kepada Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II. Sementara itu negara-negara barat yang tergabung didalam blok Sekutu masih menganggap berhak untuk berkuasa kembali atas daerah-daerah koloninya dulu. Sejak bulan April 1944 pemerintah Belanda mulai mengadakan perundingan-perundingan dengan Inggris, perundingan tersebut telah menghasilkan suatu persetujuan yang dikenal dengan "*Civil Affairs Agreement*", yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pendudukan kembali Indonesia, khususnya pulau Sumatra oleh Inggris yang mewakili sekutu. Adapun isi dari *Civil Affairs Agreement* adalah "*Pada fase pertama Panglima Tentara Sekutu akan berwenang menyelenggarakan operasi militer serta memulihkan law and order (keamanan dan ketertiban). Pada fase kedua setelah keadaan kembali normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil oper tanggung jawab tersebut dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu*"⁴⁰.

Pasca proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dihadapkan kepada upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu yang ingin menancapkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia Pada mulanya kedatangan pasukan Sekutu tersebut disikapi dengan netral oleh pihak Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa kedatangan pasukan Sekutu tersebut membonceng *Netherlands Indische Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, sikap Indonesia mulai berubah Tepat pada tanggal 29

⁴⁰ G. Moedjanto, "*Indonesia Abad ke-20*", (Yogyakarta: Konsius, 1988)

September 1945, gelombang pertama pasukan Sekutu dibawah pimpinan tentara Inggris Jenderal Sir Philips Christison mendarat di Batavia⁴¹. Belanda kembali ingin mempunyai hak atas Indonesia dengan kedatangan kembali pada tahun 1945. Berbagai alasan untuk membungkus niat lama dengan sampul baru dilakukan Belanda sebagai agitasi ke dunia internasional untuk melegitimasikan tindakan Belanda. Awal-awal tindakan Belanda yang dilakukan di Indonesia didukung penuh Sekutu, aliansi Belanda yang memenangkan perang dunia kedua. Pendaratan pertama pasukan sekutu di Jakarta pada tanggal 24 September 1945, yakni setelah enam minggu perang dunia II berakhir. Pasukan sekutu yang berada di bawah komando pasukan payung Inggris pimpinan Mayor Greenhalgh diterjunkan di lapangan udara kemayoran.

Belanda ikut disusupkan dalam pasukan itu. Tugas utama Greenhalgh dan timnya *RAPWI*, adalah untuk mempersiapkan pendaratan pasukan Inggris dan secepat mungkin menetapkan kedudukan markas sekutu di Jakarta. Pendaratan berhasil dengan mulus, dengan pasukan yang tidak memadai tanggung jawab yang ekstra dan informasi intelijennya yang amat terbatas, pasukan Sekutu ternyata menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dan sulit daripada yang diperkirakan semula, khususnya di Jawa dan Sumatera. Satuan komando pasukan sekutu yang khusus ditugaskan untuk pendudukan Indonesia, yaitu *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, dipersiapkan dengan sangat tergesa-gesa untuk menanggapi setidaknya empat macam tugas berat : (1) melucuti tentara Jepang, (2) membebaskan tawanan perang sekutu di Indonesia, (3) menegakkan ketertiban dan keamanan sehingga pemerintah sipil bisa berfungsi dan (4) menghimpun data penjahat perang dan mengadili mereka di depan pengadilan sekutu⁴².

⁴¹Ide Anak Agung Gde Agung, "*Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*", (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara: 1995). Hlm. 11.

⁴²Asmadi, "*Pelajar Pejuang*", (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), Hlm. 115.

Republik Indonesia dihadapkan pada posisi yang sangat genting, dimana masuknya sekutu khususnya pasukan Inggris sebagai pemenang perang untuk melucuti senjata tentara Jepang ternyata diikuti dengan tentara *NICA* Belanda. Tujuan Belanda sendiri untuk kembali mengambil alih Indonesia yang dahulu pernah menjadi koloninya pada masa Hindia Belanda. Keterlambatan pendaratan sekutu di Indonesia telah dimanfaatkan dengan sigap oleh para pemuda dan pemimpin Indonesia untuk memperkuat basis perjuangan kemerdekaan di Jakarta serta daerah-daerah di Jawa dan Sumatera. Instruksi sekutu dari luar Indonesia agar Jepang tetap di tempat mempertahankan status *quo* sementara menunggu kedatangan sekutu ke Indonesia menjadi kurang efektif, karena sebagian kedudukan Jepang sudah diambil alih dan senjata mereka dirampas.

Akibatnya ketika datang di Indonesia tugas utama sekutu lebih disibukkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban daripada menjalankan tugas-tugas utama mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah pasca perang. Pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara sekutu yang membawa pasukan Belanda dan yang kebanyakan terdiri atas *KNIL* orang Ambon, mendarat di Jakarta. Mereka mulai beraksi dengan mengibarkan bendera Belanda, untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda di Hindia-Belanda sudah dikembalikan. Dengan kendaraan jeep dan truk serdadu-serdadu Belanda yang sambil melepaskan tembakan. Bahkan apabila mereka berjumpa dengan mobil-mobil pembesar Indonesia yang kebanyakan memakai bendera Merah Putih kemudian ditembakinya. Perbuatan, tindakan dan tingkah yang demikian itu benar-benar menyakitkan hati, sehingga tidak mengherankan apabila sering terjadi perkelahian karena dilawan dan diserang oleh rakyat⁴³.

⁴³Drs. Tashadi dkk, “*Sejarah Revolusi Kemedekaan 1945-1949 Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), Hlm. 99.

D. Sikap Pasukan Belanda Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tidak lama setelah berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 September 1945, Indonesia kedatangan *South East Asia Command* (SEAC) dibawah pimpinan Admiral Mountbatten dan *AFNEI*, komando untuk asia tenggara yang merupakan kesatuan dari tentara-tentara yang tergabung dalam blok sekutu. Tujuan awal mereka datang ke Indonesia adalah melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun dibalik pasukan tersebut, terdapat pasukan lagi yang bernama *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), disinyalir pasukan ini justru kembali untuk mempersenjatai pasukan *Pasukan Bersenjata Kerajaan Belanda* (KNIL) yang ada di Indonesia. Van der Plas yang merupakan tokoh *NICA* mengikuti pendaratan tentara Inggris tersebut segera mengadakan kontak dengan banyak bekas interniran Belanda dan pihak-pihak lain. *NICA* berniat untuk menggunakan tentara Sekutu untuk tidak hanya mengurus penyerahan Jepang dan *RAPWI*, tetapi juga agar dapat melicinkan tugas *NICA* mendirikan Hindia-Belanda baru.

Setelah kekalahan Jepang pada perang di Asia Pasifik, pasukan Sekutu berusaha untuk secepat mungkin mengambil alih wilayah yang semula diduduki tentara Jepang termasuk Indonesia. Belanda yang merasa memiliki wilayah jajahan Hindia-Belanda bergegas untuk dapat mengirim pasukannya guna menduduki Hindia-Belanda kembali. Karena tergesa-gesa, persiapan untuk itu kurang cermat dilakukan, pemerintah Belanda tidak mengetahui bahwa segera setelah Jepang menyerah, bangsa Indonesia telah menggunakan kesempatan yang sangat bagus untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia atas inisiatif bangsa Indonesia sendiri. Menurut Van Mook (Gubernur Jenderal pemerintah Belanda di Hindia-Belanda), dengan sumber Radio Bandung proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 19 agustus 1945 atas dukungan atau pemerintah Jepang. Pemerintah Belanda percaya pada laporan Van Mook, bahkan menurut laporan Van

Mook yang memproklamkan kemerdekaan Indonesia adalah Panglima tentara Jepang Marsekal Terauchi. Dari sinilah dimulainya kesalahan Pemerintah Belanda, dugaan bahwa Republik Indonesia buatan Jepang oleh karena itu Pemerintah Belanda mengirimkan pasukan banyak ke Indonesia untuk memerangi bangsa Indonesia. Kekeliruan sikap pemerintah Belanda itu, menyebabkan kerugian dipihak Belanda maupun Indonesia dengan keluarnya biaya anggaran yang cukup besar dan jatuhnya banyak korban.⁴⁴

Meskipun demikian, Van Mook dan pasukan Sekutu tidak bersedia mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Niat awal kedatangan pasukan Sekutu ke Hindia-Belanda membebaskan para tawanan perang yang berada di kamp-kamp, menerima penyerahan dan melucuti senjata Jepang berakhir dengan pertempuran. Semua itu dapat dihindarkan, jika pasukan Sekutu bersedia untuk berbicara dan berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia sewaktu tiba di Indonesia. Berbagai macam penolakan Van Mook dan pasukan Sekutu terhadap kemerdekaan Republik Indonesia hanyalah alasan saja untuk kembali menguasai Hindia-Belanda. Dimata Belanda kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan dan menganggap Republik Indonesia sebagai buatan Jepang yang didukung oleh pemberontak.

Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, bukan terbatas hanya pada tindakan mengakui akan tetapi berusaha mempengaruhi pandangan internasional untuk ikut tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Disamping itu, sebagai salah satu negara anggota Sekutu yang menang dalam Perang Dunia II, maka Belanda berpendapat bahwa kedudukannya patut dikembalikan seperti sebelum perang. Karena itu Belanda tidak mau berunding dengan pemimpin-pemimpin RI apalagi mengakui kemerdekaannya. Menurut Belanda RI yang

⁴⁴Drs. Basuki Suwarno (Mantan Pejabat Senior Departemen Luar Negeri), "*Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1950*", (Jakarta, Pan Percetakan Upakara, 1999), Hlm. 1-2.

baru lahir mempunyai potensi sebagai negara merdeka, padahal RI belum pantas dan belum sampai pada tingkat itu.

Setelah Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu, Spit (Wakil Ketua DPR Hindia Belanda) yang juga tahanan Jepang saat itu mendapat kelonggaran untuk bisa berjalan-jalan keluar kamp. Dalam suratnya kepada Van Mook, Spit atas kehendak sendiri karena merasa masih merasa sebagai pejabat senior di Indonesia berusaha untuk memaparkan keadaan bangsa Indonesia pada saat itu. Jepang tidak pernah turut memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi Republik Indonesia dilakukan dengan rahasia sehingga tidak diketahui oleh para pembesar Jepang di batavia. Spit juga mengirim surat kepada Panglima Sekutu Mountbatten, memperingatkan tentang situasi di Indonesia kurang menguntungkan mereka. Spit merasa khawatir akan perkembangan yang terjadi, dimana senantiasa terlihat semakin kuat dan organisasi kenegaraan semakin membaik. Namun surat dengan lampiran-lampiran yang telah dikirimkannya tidak dipercaya oleh Pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan adanya laporan Van Der Plas, bahwa pernyataannya diragukan kebenarannya karena penderitaan yang hebat semasa mereka disekap dalam interniran. Pendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan bangsa Indonesia sendiri dan bukan buatan Jepang bisa menghambat rencana kembalinya Kolonialisme di Hindia-Belanda.

Van der Plas yang menjabat sebagai penasihat pasukan Sekutu, berhasil menyakinkan Pemerintah Belanda berarti berhasil menyingkirkan pendapat Spit. Van der Plas berhasil menyakinkan banyak pihak dengan menyimpulkan bahwa banyak di antara orang-orang Indonesia yang masih mendukung rencana kedatangan Belanda. Kelompok ini dapat disertai kepercayaan untuk memikul tanggung jawab dan kekuasaan. Tentu saja rencana tersebut menarik perhatian Van Mook, kemudian meminta Mounbatten agar memerintahkan kepada Panglima tentara Jepang untuk membubarkan Republik Indonesia. Sekutu menyadari bahwa Republik

Indonesia yang diproklamlirkan tidak dipimpin oleh orang-orang yang sembarangan. Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan cinta pada kemerdekaan diperlihatkan dengan menyatakan penolakan atas kedatangan tentara Belanda serta permintaan agar pendaratan Sekutu tidak diikuti oleh Belanda. Surat yang dikirimkan Pemerintah Republik Indonesia, memperlihatkan kebesaran Sukarno dan rakyat Indonesia yang bersedia menerima kedatangan Sekutu dengan tujuan untuk menerima kapitulasi tentara Jepang, melucutinya dan evakuasi para interniran (RAPWI).

Sikap pimpinan tentara Inggris di Indonesia cukup bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya untuk memanfaatkan momen yang tepat untuk memproklamlirkan kemerdekaan selagi kekuasaan di Indonesia sedang vakum, momen dimana Jepang sudah menyerah kalah dan tentara Sekutu belum datang. Namun kedatangan tentara Belanda kemudian dengan pemerintahan *NICA* yang dipimpin Van Mook, Van der Plas dll telah mengacaukan situasi. Disebabkan keinginan Van Mook yang meluap-luap untuk tetap mempertahankan cengkeramannya di Hindia-Belanda merubah situasi yang semula terkendali menjadi rusak. Menyebabkan seluruh rakyat Indonesia berontak untuk mengusir tentara Belanda, sehingga terjadi perang yang berlarut-larut. Jenderal Christison rupanya berpendirian lain, dia melihat pada kenyataan bahwa rakyat Indonesia memang ingin merdeka. Seluruh rakyat mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan bersiap untuk mempertahankannya. Christison menghormati *Atlantic Charter* yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Churchill, yang isinya mendukung kehendak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri ini harus dihormati.

Oleh karena itu, begitu tiba di Batavia Jenderal Christison tidak menentang pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga pihak Belanda menuduh Christison memberikan pengakuan *de facto* pada Pemerintahan Republik Indonesia. Belanda mengajukan protes keras atas sikap Christison terhadap Pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini membuat Christison

untuk bersikap hahti-hati agar jangan menyalahi kebijaksanaan Pemerintah Inggris yang mempunyai hubungan persahabatan dekat dengan Belanda. Dan untuk menghapus kekeliruan Christison, Mounbatten menyatakan bahwa adanya kekliruan salah kutip dari pihak pers. Permintaan Van Mook agar pasukan Sekutu melakukan tugas untuk menghancurkan kaum teroris, sikap Mounbatten dan Christison menolak pasukan Inggris digunakan bagi keperluan pelaksanaan politik Belanda di Hindia-Belanda. Mounbatten menjelaskan bahwa pasukan Sekutu hanya bertugas untuk menduduki beberapa bagian dari pulau Jawa, melucuti tentara Jepang, menerima penyerahan jepang dan mengurus *RAPWI*. Demikian halnya sikap pasukan Sekutu lainnya, posisi Amerika Serikat tegas menolak Pemerintah Belanda menegakkan Hindia-Belanda lagi dengan ditandatangani *Atlantic Charter* oleh Presiden Roosevelt.

Mengetahui sikap Belanda yang berusaha keras untuk memperoleh kembali Hindia-Belanda, Amerika Serikat bersikap tegas dan tidak akan membantu Belanda dalam upayanya itu. Bahkan Amerika Serikat menolak barang-barang sisa persenjataan Perang Dunia II yang tertinggal di Jayapura itu dibeli Belanda. Amerika Serikat menduga bahwa persenjataan tersebut akan dipergunakan Belanda untuk mengembalikan Hindia-Belanda dengan cara kekerasan. Amerika Serikat adalah penganjur agar rakyat-rakyat yang belum merdeka mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh kemerdekaannya dan menentukan bentuk pemerintahan sesuai dengan keinginan mereka. Setelah Jepang menyerah, Amerika Serikat menentukan garis politik yang jelas dalam menghadapi rakyat-rakyat terjajah untuk mengambil sikap politik sejalan dengan piagam-piagam tersebut.⁴⁵ Walaupun pada tanggal 1 Oktober 1945 pihak Belanda mengakui *de facto* atas Indonesia, namun *NICA* dan *KNIL* sering melakukan aksi provokasi untuk mengacaukan keamanan dalam negeri, seperti contoh di Surabaya, Semarang dan lain-lain. Tidak hanya provokasi mereka pun seriang

⁴⁵*Ibid.*, Hlm. 61.

meneror pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, bahkan Soekarno dan Moh. Hatta pun pernah sempat diculik oleh mereka. Inti kedatangan kembali Belanda adalah ingin kekuasaannya di Indonesia kembali. Tidak semudah itu mereka dapat merebut kembali Indonesia, mungkin ini adalah kata-kata yang tepat dalam menggambarkan reaksi rakyat Indonesia dalam menghadapi Belanda.